

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Ilmu Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Masalah sosial dapat menjadi hambatan bagi pengembangan resiliensi anak binaan. Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi melibatkan ketidakstabilan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, lingkungan sosial yang tidak mendukung, serta kurangnya dukungan dari keluarga atau masyarakat. Ketidaksetaraan dalam kesempatan hidup dan akses terhadap sumber daya juga dapat mempengaruhi resiliensi anak binaan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan dapat membantu menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi perkembangan.

Menurut (Fahrudin, 2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2015) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan Kesehatan, gangguan pendidikan gangguan kerja dan sebagainya.

Menurut definisinya Kesejahteraan Sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Kesejahteraan Sosial sebagai suatu keadaan, Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau pelayanan dan Kesejahteraan Sosial sebagai ilmu (Suud.2006).

Pengertian diatas merupakan salah satu tujuan kesejahteraan sosial itu ada, dan ini menjadi tanggung jawab bagi para pekerja sosial dalam memenuhi individu untuk mencapai kehidupan yang layak.

Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi (keadaan) dapat terlihat dari Rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 2 ayat 1: “Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Berdasarkan definisi tersebut dipahami bahwa ilmu kesejahteraan sosial mengacu pada keadaan, usaha, serta pelayanan yang secara nyata untuk memenuhi kebutuhan individu. Individu yang berfungsi secara sosial tentunya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha usaha yang dilakukannya dalam mencapai pemenuhan kehidupan tersebut.

2.1.2. Konsep Ilmu Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial melibatkan evaluasi terhadap kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Ini mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dukungan sosial. Evaluasi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan dan mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang mungkin perlu diatasi.

Dalam konteks anak binaan, tinjauan kesejahteraan sosial akan memperhatikan bagaimana aspek-aspek tersebut memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak binaan. Evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan resiliensi anak binaan.

Konsep Kesejahteraan Sosial sebagai suatu program yang terorganisir dan sistematis yang di lengkapi dengan segala macam keterampilan ilmiah, merupakan sebuah konsep yang relative baru berkembang. Kesejahteraan sosial merujuk pada kondisi umum kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan dalam suatu masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan dukungan sosial. Kesejahteraan sosial bukan hanya tentang keberhasilan individu, tetapi juga tentang keadilan dan kemakmuran yang merata di seluruh masyarakat. Dalam konteks kebijakan dan studi sosial, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sering melibatkan implementasi program-program dan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Kesejahteraan Sosial memiliki dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai Tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan Masyarakat yang lebih baik. Menurut Undang- undang no.11 tahun 2009, Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2.1.3. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Pada tujuan Kesejahteraan Sosial menurut (Fahrudin, 2014) Tujuan utama Kesejahteraan Sosial meliputi pemenuhan kebutuhan sehari hari yaitu sandang, pangan, papan dan akses pendidikan dan Kesehatan yang mudah dijangkau. Serta melakukan penyesuaian diri dengan Masyarakat sekitar misalnya meningkatkan pengembangan taraf hidup yang layak.

Schneiderman (1972) dalam buku (Fahrudin, 2014:10) mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

a) Pemeliharaan sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun di Masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam Masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, Kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

b) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan Masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

c) Perubahan sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

2.1.4 Fungsi – fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosial- ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu:

- a) Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.
- b) Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.
- c) Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses Pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat.
- d) Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan.

Fungsi utama kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Masyarakat agar tercapainya kehidupan yang layak.

2.1.5 Komponen Kesejahteraan Sosial

Selain mempunyai tujuan dan fungsi, Kesejahteraan sosial juga memiliki komponen yang harus diperhatikan. Menurut (Fahrudin, 2014) menyimpulkan bahwa semua komponen tersebut adalah:

a) Organisasi formal

Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh Lembaga sosial formal untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayanan yang berfungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.

b) Pendanaan

Mobilisasi merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.

c) Kebutuhan manusia

kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus pada satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. Agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial.

d) Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial tentunya dilaksanakan dengan proses dan peraturan yang telah ditentukan.

e) Perangkat hukum dan perundang-undangan

Pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial secara terstruktur dan tepat sasaran.

f) Peran serta masyarakat

kegiatan kesejahteraan melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar dapat memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri.

g) Data dan informasi

Data dan informasi sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial untuk memudahkan dan memberikan pelayanan secara efisien.

2.1.6 Bidang – Bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam kesejahteraan sosial selain berfokus pada keberfungsian sosial yang terjadi di masyarakat, ternyata kesejahteraan sosial juga memiliki beberapa bidang-bidang kesejahteraan sosial. Bidang-bidang kesejahteraan sosial lebih difokuskan dalam arti luas menurut (Adi, 2013):

Bidang kesejahteraan sosial dilihat berdasarkan besaran kelompok sasaran:

- 1) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan individual.
- 2) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan keluarga.
- 3) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan kelompok.
- 4) Bidang yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal (komunitas lokal).

- 5) Bidang yang terkait dengan pengembangan kesejahteraan publik secara luas.

Bidang kesejahteraan sosial dilihat berdasarkan tingkat usia kelompok sasaran ;

- 1) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan anak dan remaja
- 2) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan generasi muda
- 3) Bidang yang terkait dengan kesejahteraan lansia (manusia lanjut usia)

Bidang kesejahteraan sosial dilihat berdasarkan sektor- sektor Pembangunan

- 1) Bidang yang terkait dengan Pembangunan sektor pendidikan
- 2) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor kesehatan
- 3) Bidang yang terkait dengan Pembangunan sektor kesejahteraan sosial dalam arti sempit (di Indonesia terkait dengan kewenangan kementerian sosial)
- 4) Bidang yang terkait dengan Pembangunan sektor kependudukan dan lingkungan hidup
- 5) Bidang yang terkait dengan Pembangunan sektor perumahan
- 6) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor ketenagakerjaan
- 7) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor pertanian
- 8) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan
- 9) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor industry
- 10) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor hukum dan HAM
- 11) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor agama

Bidang kesejahteraan sosial dilihat berdasarkan kekhususan masalah yang ditangani:

- 1) Bidang yang terkait dengan lembaga koreksional.
- 2) Bidang yang terkait dengan lembaga kesehatan mental.
- 3) Bidang yang terkait dengan lembaga pelayanan medis.
- 4) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani kecacatan.
- 5) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah prostitusi.

- 6) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah perdagangan anak dan perempuan.
- 7) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani kasus HIV/AIDS.
- 8) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah migrasi dan kebencanaan.
- 9) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah kemiskinan.
- 10) Bidang yang terkait dengan lembaga yang menangani masalah gelandangan dan pengemis.

Bidang- bidang di atas, pada hakikatnya adil dari pengembangan para ahli guna peningkatan kondisi kualitas individu yang sudah ada. Dengan adanya bidang- bidang yang sudah dibentuk akan menjadikan fokus sesuai dengan bidangnya.

2.2 Konsep Pelayanan Sosial

Resiliensi anak binaan binaan perlu mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang akan membangun ketahanan anak terhadap berbagai tantangan kehidupan. Usaha-usaha tersebut ditujukan untuk membantu anak mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosi anak untuk mengatasi stress dan tekanan, serta mengajarkan nilai nilai positif pada anak.

2.2.1 Pengertian Pelayanan Sosial

Adapun definisi mengenai pelayanan sosial menurut (Huraerah, 2011:45) adalah kegiatan yang terorganisir yang ditunjukkan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sebagai akibat ketidak mampuan keluarga melaksanakan fungsi-fungsinya. Kegiatan ini antara lain berupa pelayanan sosial

bagi anak (termasuk balita dan remaja) serta usia lanjut terlantar atau mengalami bentuk kecacatan.”

Pelayanan sosial juga upaya atau kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan, perlindungan atau dukungan kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Adapun definisi pelayanan sosial menurut Alfred J.Khan (Fahrudin, 2012:51) yaitu pelayanan sosial merupakan suatu konteks kelembagaan yang terdiri dari program- program yang telah disediakan berdasarkan kriteria, yakni dalam menjamin tingkatan dasar yang terdiri dari penyediaan kesehatan, sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat juga keberfungsian sosial individu, dan juga untuk memudahkan akses pada pelayanan- pelayanan dan lembaga pada umumnya, untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kebutuhan”

Pelayanan sosial dari pengertian di atas dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan dalam menjamin tingkatan dasar kebutuhan suatu individu, kelompok dan masyarakat yang sedang dalam kesulitan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Adapun menurut (Edi, 2017) yang mengembangkan konsep pelayanan sosial yaitu pelayanan sosial merupakan aksi atau Tindakan untuk mengatasi masalah sosial. Pelayanan sosial dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditunjukkan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika keadaan individu tau kelompok tersebut dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, dan bahkan kriminalitas.

2.2.2 Fungsi Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial diadakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial. Ini melibatkan penyediaan bantuan, dukungan dan sumber daya untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Pelayanan

sosial juga dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan, melindungi hak- hak sosial, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam suatu komunitas.

Pelayanan sosial disini bukanlah hanya sebagai pemberi dukungan dan informasi namun juga sebagai yang menghubungkan seseorang dengan sumber - sumber yang diperlukan dengan melaksanakan program- program referral. Menurut (Fahrudin, 2012:54) menjelaskan tentang fungsi- fungsi pelaynan sosial adalah:

- 1) Pelayanan- pelayanan untuk sosialisasi dan pengembangan
- 2) Pelayanan- pelayanan untuk terapi, pertolongan dan rehabilitasi, termasuk perlindungan sosial dan perawatan pengganti.
- 3) Pelayanan- pelayanan untuk mendapatkan akses, informasi, dan nasihat.

Fungsi pelayanan sosial dari ketiga penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi pelayanan sosial ditujukan untuk membantu masyarakat, keluarga dan individu agar mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhannya serta mencapai kesejahteraannya.

2.2.3 Tujuan Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan bantuan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh. Pelayanan sosial bertujuan untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan. Menurut Suharto (2009:12) pelayanan sosial memiliki beberapa tujuan yaitu:

- 1) Untuk membantu orang agar dapat mecapai ataupun menggunakan pelayanan yang tersedia
- 2) Untuk pertolongan dan rehabilitasi, dikenal adanya pelayanan terapi termasuk didalamnya perlindungan dan perawatan, serta pelayanan yang dilakukan.
- 3) Untuk pengembangan, dikenal dengan pelayanan sosialisasi dan pengembangan.

Tujuan pelayanan sosial dari ketiga penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu pelayanan sosial adalah untuk membantu suatu individu, kelompok dan masyarakat untuk membantu dan mengembangkan kedalam kehidupan yang lebih Sejahtera.

2.3 Tinjauan Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

2.3.1. Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial merupakan sebuah rutinitas upaya pengembangan sumber-sumber daya dalam menumbuhkan, membina, dan meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial serta menunjang usaha-usaha lain yang mempunyai tujuan yang sama. Menurut Cassidy yang dikutip (Fahrudin, 2012:15)mengatakan:

“Sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalisasi, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan.”

Menurut pengertian di atas usaha kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan terorganisasi dan merupakan kegiatan yang kongkrit untuk menjawab masalah-masalah kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat ditunjukkan pada individu, kelompok, dan masyarakat.

2.3.2 Konsep Dasar Usaha Kesejahteraan Sosial

Pada konsep dasar usahasa kesejahteraan sosial, jika masalah sosial tidak dapat teratasi maka akan terjadinya masalah sosial yang cukup kompleks. Usaha- usaha kesejahteraan sosial yang meliputi Tindakan untuk mengatasi masalah sosial melalui pelayanan sosial menurut (Suharto, 2017):

Kegiatan terorganisir untuk meningkatkan kondisi orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Sosial dan sejumlah besar organisasi-organisasi non pemerintah telah memainkan peranan penting dalam bidang pelayanan sosial. Untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial yang dikenal sebagai usaha kesejahteraan sosial.

Dengan demikian pelayanan sosial merupakan bentuk dari tindakan usaha kesejahteraan sosial dan hal ini tentu tidak menolong orang-orang terpilih bahkan orang yang memiliki masalah sosial seminim apapun ditangani. Dan begitu untuk melakukan kegiatan menangani masalah sosial tersebut dikenal sebagai usaha kesejahteraan sosial.

2.3.3. Jenis- jenis Usaha Kesejahteraan Sosial

Dalam (Fahrudin, 2012:18) menjelaskan tentang jenis usaha kesejahteraan sosial yang ditawarkan ke masyarakat dapat berupa:

- a. Layanan yang langsung ditunjukkan ke kelompok/komunitas sasaran yang dikenal dengan nama Direct Service. Misalnya saja, suatu lembaga pelayanan masyarakat mengembangkan program pengembangan modal usaha dan berbagai macam model pemberian bantuan keuangan untuk komunitas (income generating activities), program bea siswa untuk anak yang tidak mampu dan sebagainya. Di sini semua layanan yang dilakukan oleh lembaga ditunjukkan langsung pada komunitas sasaran.
- b. Layanan yang tidak langsung diarahkan pada komunitas sasaran, tetapi bantuan diberikan pada lembaga yang mempunyai program langsung ke komunitas sasaran. Bentuk layanan ini dikenal dengan Indirect Services, misalnya suatu lembaga donor internasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan angka kematian bayi (infant mortality rate) maka lembaga tersebut mengontak berbagai organisasi pelayanan masyarakat (human service organisation)

Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa suatu usaha kesejahteraan sosial diajukan oleh suatu organisasi pelayanan sosial masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat. Dalam melakukan perubahan di masyarakat, organisasi pelayanan masyarakat dapat melakukannya secara langsung ke komunitas sasaran ataupun melakukan secara tidak langsung ke komunitas sasaran. Dalam upaya memberikan pelayanan langsung ke komunitas sasaran tersebut, berbagai organisasi pelayanan masyarakat menggunakan tenaga profesi pekerja sosial sebagai yang utama di dalamnya.

2.3.4. Tujuan Usaha- usaha Kesejahteraan Sosial

Karena usaha kesejahteraan sangat dipengaruhi oleh organisasi yang menyediakan usaha kesejahteraan tersebut. Menurut Mendoza yang dikutip (Fahrudin, 2012:16) menyatakan tiga tujuan dari usaha kesejahteraan sosial yaitu:

1. Tujuan Kemanusiaan dan Keadilan Sosial (Humanitarian and Social Justice Goal). Tujuan ini, bersumber dari gagasan ideal demokratis tentang keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi diri yang mereka miliki. Meskipun kadangkala potensi tersebut tertutup oleh adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan ataupun berbagai faktor lainnya. Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak dilahirkan pada upaya pengidentifikasian kelompok yang paling tidak mendapat perhatian; kelompok yang paling dilerantarkan; kelompok yang paling tergantung terhadap pihak lain ataupun kelompok yang kurang diuntungkan. Usaha kesejahteraan sosial menjadikan mereka sebagai kelompok sasaran dalam upaya menjembatani kelangkaan sumber daya kelompok sasaran miliki.
2. Tujuan yang terkait dengan Pengendalian Sosial (Social Control Goal) Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, akan melakukan “serangan” ataupun menjadi “ancaman” bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan. Karena itu, kelompok masyarakat yang sudah

mapan berupaya “mengamankan” diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemikiran maupun stabilitas yang sudah berjalan, misalnya saja perusahaan multi nasional yang mengalokasikan sebagian kecil dari anggarannya untuk memberikan bantuan keuangan pada masyarakat sekitar lokasi, agar mereka tidak melakukan perusakan pada property yang dimiliki perusahaan ataupun melakukan pembelokiran jalan ke arah lahan pertambangan.

3. Tujuan yang terkait dengan Pembangunan Ekonomi (Ekonomi Development Goal) Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produktifitas barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Beberapa contohnya usaha kesejahteraan sosial yang searah dengan tujuan pembangunan ekonomi adalah:

- a) Beberapa tipe usaha kesejahteraan sosial yang secara langsung memberikan sumbangan terhadap peningkatan produktifitas individu, kelompok ataupun masyarakat. Seperti usaha kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan konseling pada pekerja di sektor industri, usaha kesejahteraan sosial yang memfokuskan pada pelatihan bagi mereka yang masih atau sedang mengagur, dan sebagainya.
- b) Usaha kesejahteraan sosial yang berupaya untuk mencegah dan meminimalisir hambatan “beban” akibat adanya “tanggungan” dari pada pekerja dewasa. “tanggungan” (dependent) di sini bisa saja anggota keluarga yang mengalami kecacatan, dan sebagainya. Usaha kesejahteraan sosial yang dikembangkan dalam kaitan dengan hal ini bisa saja berupa, tempat penitipan anak; panti werdha, pusat rehabilitasi, dan sebagainya.
- c) Usaha kesejahteraan sosial yang mencegah atau “melawan” pengaruh buruk dari urbanisasi dan industrilisasi terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membantu mengidentifikasi dan mengembangkan kepemimpinan, lokal dan komunitas. Misalnya, program latihan

kepemimpinan, program pendidikan kehidupan berkeluarga dan sebagainya.

2.4. Konsep Masalah Sosial

Menurut (Suharto, 2005) menjelaskan bahwa para sosiolog biasanya memandang masalah sosial sebagai situasi tertentu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Sebagian besar orang yang setuju bahwa tindakan harus dilakukan untuk mengubah situasi itu. Masalah sosial merujuk pada kondisi atau situasi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma atau harapan masyarakat. Ini bisa mencakup ketidaksetaraan, atau isu-isu lain yang mempengaruhi kesejahteraan sosial.

2.4.1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial merujuk pada kondisi atau situasi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun pengertian masalah sosial menurut Kartini Kartono (Huraerah, 2008:45) yaitu masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama). Masalah sosial dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai situasi sosial yang mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak. Masalah sosial dipandang sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan, sehingga jika seseorang atau masyarakat sedang mengalami suatu masalah sosial maka harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk kedepannya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan atau untuk lingkungan sekitar.

Adapun menurut Janssen (1992:42) yang dikutip oleh Suharto (2005:83) masalah sosial secara umum didefinisikan sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang seharusnya. Dan dalam hal itu masalah difokuskan kepada masalah sosial. Adapun menurut Horton dan Leslie dalam Suharto (2005:82) mendefinisikan masalah sosial adalah suatu kondisi yang dirasakan banyak orang tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial secara kolektif.

2.4.2. Faktor Penyebab Masalah Sosial

Masalah sosial dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya akses pendidikan, diskriminasi rasial atau gender, konflik politik dan ketidakadilan sosial. Faktor- faktor ini sering saling terkait dan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung munculnya masalah sosial seperti kemiskinan. Ketidaksetaraan dan konflik. Adapun menurut Soekanto (2012) ukuran suatu gejala sosial dapat dikatakan sebagai masalah sosial adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial.
- 2) Sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari suatu gejala sosial di masyarakat.
- 3) Adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya.
- 4) Masalah sosial yang nyata (manifest social problem) dan masalah sosial tersembunyi (latent social problem).
- 5) Perhatian masyarakat dan masalah sosial.
- 6) Sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial.

Keragaman masalah sosial yang ada di masyarakat memerlukan adanya suatu pendekatan untuk mengetahui faktor penyebab tersebut.

2.4.3 Karakteristik Masalah Sosial

Berdasarkan definisi Horton dan Leslie (1982) dalam Suharto (2017), disimpulkan bahwa masalah sosial mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Masalah sosial dapat dikatakan sebagai kondisi yang dapat dirasakan oleh seluruh individu. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang. Masalah tersebut adalah masalah sosial.

2. Masalah sosial dapat dikatakan sebagai kondisi yang tidak menyenangkan. Menurut paham hedonism orang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Suatu kondisi dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya.
3. Masalah sosial dapat dikatakan sebagai kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi yang dianggap tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan.
4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual, masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang.

Karakteristik masalah sosial juga memiliki kompleks dan bervariasi, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan layanan.

2.5. Tinjauan Pada Resiliensi

2.5.1. Pengertian Resiliensi

Resiliensi merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *resilience* yang memiliki arti daya pegas, daya kenyal dan kegembiraan. Menurut Jackson dan Watkin (2004) Resiliensi merupakan suatu konsep yang dapat menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengatasi serta dapat beradaptasi dengan masa sulit yang dihadapi. Resiliensi sendiri dapat menentukan diri seseorang dalam menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam kehidupannya.

Resiliensi menurut Utami dan Hemil (2017) merupakan kapasitas manusia untuk menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam kehidupan. Resiliensi juga sebagai kemampuan seseorang untuk bertahan dan tidak mudah menyerah dalam keadaan sulit serta berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan tersebut, kemudian bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi (Mufidah, 2017)

Menurut (Grotberg, 2001) Resiliensi merupakan kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh individu untuk menghadapi, mengatasi atau bahkan mengubah pengalaman yang bersifat sulit, termasuk dalam bencana alam maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dimana ketika hal tersebut dialami dalam hidupnya, individu dapat belajar dari kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Resiliensi yang dimiliki oleh individu dalam kondisi atau pengalaman yang buruk dapat sangat membantu untuk meningkatkan keyakinan dan harapan yang memadai sebagai fungsi sosial dan pribadi yang lebih efektif. Resiliensi juga bukan merupakan hal yang magic dan tidak hanya bisa ditemui pada orang-orang tertentu saja dan resiliensi juga bukanlah pemberian dari sumber yang tidak diketahui. Tidak hanya sebatas hal tersebut, Grotberg juga berpendapat bahwa resiliensi yang dimiliki oleh setiap individu memiliki kualitas yang berbeda. Kualitas resiliensi tersebut dapat ditentukan oleh tingkat usia individu, taraf perkembangan yang terjadi pada setiap individu, intensitas ketika individu berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, serta besar kecilnya dukungan sosial dalam membentuk resiliensi itu sendiri. Menurut (Desmita, 2009), resiliensi merupakan kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki oleh seseorang baik secara kelompok maupun bermasyarakat yang memungkinkan untuk menghadapi, meminimalisir, mencegah atau bahkan menghilangkan dampak-dampak yang bersifat merugikan dari kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Atau bahkan juga dapat mengubah suatu kondisi dari yang menyengsarakan menuju suatu hal yang wajar untuk diatasi.

(Rutter, 2006) juga menyatakan bahwa resiliensi merupakan suatu kekuatan yang dapat digunakan sebagai ketahanan yang merupakan sebuah konsep interaktif yang mengacu pada resistensi yang relative terhadap pengalaman risiko lingkungan ataupun mengatasi stress dan kemalangan.

Dari beberapa pengertian resiliensi yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang atau individu dalam mempertahankan dirinya ketika berada dalam keadaan-keadaan yang sulit baginya dengan maksud bahwa dalam hal ini tidak hanya sekedar narapidana yang betah hidup didalam LPKA saja, namun bagaimana cara dia mengembangkan diri untuk lebih efektif dalam mengubah kondisi yang

tertekan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Termasuk mengembangkan diri dalam keterbatasan lingkungan, pulih dari keadaan yang menekan serta mampu beradaptasi dalam kondisi lingkungan tersebut.

2.5.2. Karakteristik Individu yang Resilien

Individu yang resilien memiliki karakteristik utama dalam membentuk kemampuan resiliensinya. Wolin dan Wolin (1999), menyebutkan terdapat tujuh karakteristik, dimana karakteristik tersebut dapat membantu individu untuk mampu beradaptasi dalam menghadapi masalahnya secara baik, mengatasi hambatan yang muncul, dan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal (dalam Kartika dan Dewindara Ayu, 2011).

Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

a) Insight

Insight merupakan kemampuan mental dalam bertanya kepada diri sendiri kemudian dilanjutkan dengan jawaban yang jujur. Hal ini bertujuan untuk dapat membantu individu dalam memahami diri sendiri serta memahami orang lain. Selain itu tujuannya adalah untuk dapat menyesuaikan diri dalam berbagai situasi.

b) Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan dalam mengambil jarak secara fisik maupun emosional dari sumber permasalahan yang terjadi dalam hidup seseorang. Kemandirian ini melibatkan adanya kemampuan untuk menjaga suatu keseimbangan yang terjadi antara jujur terhadap diri sendiri dan kepedulian terhadap orang lain.

c) Hubungan

Individu yang resilien akan dapat mengembangkan suatu hubungan yang dijalani secara jujur, saling mendukung, berkualitas dalam kehidupan dan adanya role model yang sehat.

d) Inisiatif

Individu yang resilien dapat bersikap proaktif dan bertanggung jawab atas pemecahan masalah yang dihadapinya, mereka selalu berusaha untuk memperbaiki diri ataupun situasi yang dapat diubah, selain itu mereka juga meningkatkan kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat diubah. Karena inisiatif disini melibatkan keinginan yang bersifat kuat untuk bertanggung jawab dalam kehidupan sendiri dan masalah yang dihadapi.

e) Kreatifitas

Kreativitas merupakan kemampuan dalam memikirkan berbagai pilihan, alternative dan konsekuensi dalam menghadapi tantangan hidup. Kreativitas juga melibatkan daya imajinasi yang digunakan untuk mengekspresikan diri dalam seni, serta dapat membuat seseorang mampu dalam menghibur diri sendiri saat dihadapkan dalam kesulitan. Individu yang resilien juga mampu mempertimbangkan konsekuensi dari masalah yang dihadapinya.

f) Humor

Humor merupakan kemampuan individu dalam melihat sisi terang kehidupan, Humor merupakan kemampuan individu dalam melihat sisi terang kehidupan, sehingga dalam hal ini individu dapat menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun, karena individu yang resilien dapat menggunakan rasa humornya untuk memandang tantangan hidupnya dengan cara yang baru dan lebih ringan.

g) Moralitas

Moralitas ini biasanya ditandai dengan keinginan untuk hidup yang secara baik dan produktif. Individu yang resilien dapat mengevaluasi berbagai macam hal serta membuat keputusan yang tepat tanpa rasa takut akan pendapat dari orang lain.

h) Sumber Pembentuk Resiliensi

Grotberg (2001) menyebutkan sumber-sumber resiliensi untuk mengatasi suatu konflik yang disebabkan oleh keadaan yang tidak menyenangkan serta untuk mengembangkan resiliensi yang terdapat pada remaja. Sumber-sumber resiliensi tersebut ada 3 yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) I Am

I am merupakan salah satu faktor kekuatan yang berasal dari dalam diri individu, seperti kepercayaan, perasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam diri seseorang. Desmita (2005), menjabarkan beberapa kualitas pribadi yang dapat mempengaruhi I Am. Kualitas pribadi tersebut adalah:

- a) Memiliki banyak orang yang tidak hanya menyukai, namun juga menyayangnya
- b) Mencintai dalam artian dapat merasakan apa yang orang lain rasakan serta memiliki rasa peduli terhadap suatu hal yang menimpa orang lain.
- c) Memiliki rasa bangga terhadap dirinya sendiri.
- d) Kemauan akan tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya serta bersedia untuk menerima konsekuensi atas apa yang telah dilakukannya.
- e) Memiliki rasa percaya akan dirinya sendiri, keyakinan serta memiliki banyak harapan.

2. I Have

I have merupakan salah satu aspek yang merupakan sumber bantuan dari luar untuk meningkatkan resiliensi. Sumber-sumber tersebut berupa pemberian semangat agar mandiri, baik untuk individu yang independen maupun yang masih tergantung dengan keluarga, masih bisa mendapatkan pelayanan secara konsisten, seperti rumah sakit, dokter ataupun pelayanan yang sejenis. Role models juga merupakan salah satu faktor pada aspek I have dengan alasan bahwa orang-orang dapat menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh individu seperti informasi terhadap sesuatu dan memberikan semangat kepada individu lain agar dapat mengikutinya. Sumber yang lain dalam I have adalah memiliki hubungan, dimana seseorang yang memiliki hubungan dekat seperti, suami, istri, anak maupun orang tua merupakan orang-orang yang mencintai dan menerimanya dengan apa adanya. Namun terkadang individu juga masih membutuhkan dukungan dari orang lain yang dengannya dapat memenuhi kebutuhan kasih sayangnya dari orang terdekat.

Desmita (2005), menjelaskan terdapat beberapa kualitas yang dapat membangun I Have dalam membentuk suatu resiliensi pada individu.

Kualitas-kualitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kepercayaan yang penuh dalam menjalani suatu hubungan dengan orang lain.
- b) Memiliki struktur serta aturan yang diberlakukan dalam suatu rumah tangga.
- c) Memiliki orang-orang yang dapat dijadikan contoh atau panutan untuk menjadi lebih baik.
- d) Memiliki dorongan untuk lebih mandiri, dalam artian tidak mau menyusahkan.
- e) Mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan keamanan serta layanan yang berhubungan dengan kesejahteraan individu.

3. I Can

I can merupakan salah satu faktor kompetensi sosial dan interpersonal seseorang. Bagian-bagian dari faktor ini bertujuan untuk mengatur berbagai perasaan dan rangsangan dimana individu dapat mengenali perasaannya, mengenali jenis emosinya serta dapat mengekspresikan dalam kata maupun perilakunya namun tidak menggunakan kekerasan terhadap perasaan, dan hak orang lain maupun diri sendiri. Mencari hubungan yang dapat dipercaya, dimana dalam hal ini individu dapat menemukan seseorang yang dipercayainya seperti orang tua, saudara, teman sebaya atau mungkin masyarakat yang dapat dimintai pertolongan, berbagi perasaan dan perhatian dengan tujuan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah personal maupun interpersonal. I Can merupakan sumber pembentuk resiliensi yang

berkaitan dengan keterampilan individu, maka Desmita (2005), menjelaskan keterampilan-keterampilan dalam sumber I Can sebagai berikut:

- a) Kemampuan berkomunikasi dengan baik, dimana individu mampu mengekspresikan berbagai macam pikiran dan perasaan pada orang lain dan dapat mendengarkan apa yang dikatakan orang lain dengan baik serta dapat memposisikan dirinya sebagai orang lain dan merasakan perasaannya.
- b) Kemampuan dalam memecahkan masalah, dengan tujuan individu dapat menilai suatu masalah secara alami serta dapat mengetahui apa yang mereka butuhkan agar dapat memecahkan masalah serta dapat mengetahui jenis bantuan apa yang ia butuhkan dan dapat diberikan oleh orang lain.
- c) Kemampuan dalam mengendalikan perasaan serta dorongan yang dimiliki oleh seorang individu.
- d) Dapat mengukur suatu emosi, baik yang ada dalam diri sendiri maupun orang lain.
- e) Dapat membangun hubungan yang saling mempercayai dengan orang lain.

Desmita (2005) menyatakan bahwa sumber-sumber tersebut merupakan suatu sumber yang saling berhubungan untuk dapat membentuk suatu resiliensi pada diri individu. Sehingga individu yang hanya memiliki satu sumber dalam dirinya tidak dapat dikatakan sebagai individu yang resilien. Jadi, ketika individu yang memiliki satu sumber saja, maka ia masih membutuhkan sumber-sumber lain yang dapat mendukung terbentuknya resiliensi pada diri individu tersebut.

2.5.3 Aspek-Aspek Resiliensi

Reivich dan Shatte (2002), menjelaskan terdapat kemampuan-kemampuan dalam diri individu untuk membentuk resiliensi, namun menurutnya hampir tidak ada satupun individu yang dapat memiliki kemampuan tersebut secara keseluruhan dengan baik. Kemampuan-kemampuan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Emotion Regulation

Emotion regulation merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk tetap tenang ketika ia berada di bawah kondisi yang bersifat menekan. Menurut Reivich (2002), emosi yang dirasakan oleh seorang individu dapat berpengaruh terhadap sikap yang akan ditunjukkan oleh individu kepada orang lain. Reivich juga menjelaskan bahwa setiap individu memiliki keterampilan untuk memudahkan mereka dalam meregulasi emosi, bentuk-bentuk dari keterampilan tersebut adalah menjaga kondisi untuk tetap tenang dan fokus, dimana keterampilan-keterampilan ini akan membantu individu dalam mengendalikan emosinya. Selain hal tersebut bentuk keterampilan yang lain yaitu menjaga perasaan ketika individu merasakan kesedihan, serta mengurangi kecemasan ketika individu mengalaminya.

b) Impulse Control

Impulse control merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri individu, karena setiap individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan dorongan maupun tekanan yang muncul dari dirinya sendiri. Ketika individu memiliki pengendalian impuls yang rendah, maka perubahan emosi yang dialami individu akan berubah dengan cepat sehingga hal tersebut akan berdampak pada pengendalian pikiran-pikiran serta perilaku yang dimunculkan. Akibat dari perubahan emosi yang dengan mudah tersebut dapat menunjukkan perilaku individu yang mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif serta cenderung mudah melakukan kekerasan. Perilaku-perilaku yang dimunculkan akibat perubahan emosi dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada orang-orang yang ada di sekitar individu, selain itu juga dapat berdampak pada hubungan individu dengan lingkungannya, karena hal ini sangat mengganggu (Reivich, 2002). Kemampuan individu dalam mengendalikan impuls sangat erat kaitannya dengan kemampuan regulasi emosi yang dimiliki individu.

c) Optimism

Optimism merupakan kemampuan dalam diri individu untuk melihat masa depan dengan pandangan yang cerah. Individu yang memiliki optimisme menandakan bahwa individu tersebut percaya dengan dirinya yang memiliki kemampuan untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Sikap optimisme yang dimiliki oleh individu dapat menjadikannya sebagai individu yang resilien. Hal tersebut dengan alasan bahwa mereka memiliki harapan dan kepercayaan bahwa kehidupan yang dijalani oleh mereka akan dapat berubah menjadi lebih baik. Selain hal tersebut individu yang memiliki sikap optimisme juga percaya bahwa dirinya mampu untuk mengatasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidupnya. Menurut Reivich (2002), optimisme yang diperlukan untuk membentuk resiliensi adalah optimisme yang realistis, artinya adanya sebuah kepercayaan pada individu akan terwujudnya kehidupan yang lebih baik, dimana kepercayaan tersebut tidak hanya sekedar kepercayaan, namun juga diiringi dengan usaha-usaha untuk mewujudkannya. Hal ini berbeda dengan *unrealistic optimism*, dimana dalam hal ini individu hanya sekedar memiliki kepercayaan untuk hidup yang lebih baik, namun tidak diiringi dengan usaha untuk mewujudkannya.

d) Causal Analysis

Causal analysis ini lebih merujuk kepada kemampuan individu dalam mengidentifikasi secara akurat penyebab dari permasalahan yang dihadapinya. Bagi individu yang tidak bisa mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang dihadapinya secara tepat, akan berbuat kesalahan yang sama secara terus menerus. Individu yang resilien akan memiliki pemikiran yang fleksibel, sehingga dapat mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah yang mereka hadapi secara signifikan tanpa terjebak gaya berpikir tertentu. Mereka juga tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang telah diperbuatnya hanya untuk menjaga harga dirinya ataupun membebaskan diri mereka dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Reivich (2002), individu yang dapat menganalisis penyebab permasalahannya, mereka tidak terlalu berpikir akan hal-hal yang berada diluar kendali diri mereka. Mereka menyalurkan serta mengendalikan

kemampuan mereka pada pemecahan masalah, walaupun perubahan yang terjadi masih secara bertahap, namun mereka mulai mengatasi permasalahan yang ada, mengarahkan hidup mereka, bangkit kembali sehingga dapat mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.

e) Emphaty

Empahaty ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu dalam dalam membaca tanda-tanda kondisi psikologis serta kondisi emosional yang muncul dari orang lain. Individu yang dapat menafsirkan bahasa-bahasa nonverbal yang dilakukan oleh orang lain, meliputi ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh dan mampu menangkap apa yang dipikirkan serta dirasakan oleh orang lain memiliki dampak yang luar biasa, hal ini berupa hubungan yang baik antara individu dengan lingkungannya.

f) Self Efficacy

Self efficacy lebih mengarah kepada kemampuan individu untuk memecahkan masalah yang dialami untuk mencapai kesuksesan. Kepercayaan kompetensi yang dimiliki individu dapat membantu individu tersebut untuk tetap berusaha dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk mempertahankan harapan. Kepercayaan yang telah dimiliki oleh individu akan kemampuannya dapat membantu individu tersebut untuk tetap berusaha dalam situasi yang penuh dengan tantangan, dan hal tersebut mempengaruhi kemampuan individu untuk tetap mempertahankan harapan dan keberhasilan yang akan dicapainya. *Self efficacy* yang tinggi yang dimiliki oleh individu membuat individu tersebut memiliki komitmen untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, dan ketika individu tersebut mengetahui jika strategi yang digunakan telah gagal atau tidak berhasil maka individu akan mencari jalan keluar yang lain dan tidak akan menyerah. Dalam membangun resiliensi *self efficacy* ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting. *Self efficacy* akan terus meningkat seiring dengan kemampuan individu untuk membangun sebuah keberhasilan dalam memecahkan suatu masalah walaupun hal itu dilakukan secara bertahap, karena *self efficacy* adalah hasil dari keberhasilan pemecahan masalah (Reivich, 2002: 45).

g) Reaching Out

Reaching out disini dimaksudkan dengan kemampuan individu dalam meraih aspek-aspek positif dari kehidupannya, setelah kemalangan yang menyimpannya. Akan tetapi kebanyakan dari individu tidak mampu melakukan reaching out, dikarenakan sejak kecil individu tersebut sudah diajarkan menghindari kegagalan dan menghindari kejadian memalukan dalam hidupnya. Dalam hal ini sangat berpengaruh dengan kehidupan selanjutnya, individu yang sejak kecil sudah dilatih menghindari kejadian-kejadian memalukan dan kegagalan akan memilih kehidupan yang biasa-biasa saja, daripada harus menjadi sukses namun harus menghadapi kegagalan dan hinaan masyarakat. Kejadian seperti hal tersebut cenderung memungkinkan untuk melebih-lebihkan hal buruk yang akan terjadi di masa depan (Reivich, 2002: 46-47).

2.5.4 Faktor yang Mempengaruhi Resiliensi

Reivich & Shatte (Dewanti, 2014) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi yaitu:

a. Faktor risiko

Yaitu faktor yang dapat memberikan efek secara langsung dan dapat menimbulkan perilaku yang maladaptif (tidak mampu beradaptasi). Faktor risiko dapat menempatkan individu dalam risiko kegagalan ketika menghadapi situasi yang sulit. Faktor risiko juga dapat menggambarkan beberapa pengaruh yang dapat meningkatkan munculnya suatu penyimpangan atau perilaku negatif. Menurut Grothberg (1999) disebutkan bahwa faktor risiko dapat berasal dari berbagai sumber, baik eksternal seperti keluarga, maupun internal yang berasal dari diri sendiri.

b. Faktor protektif

Yaitu faktor karakteristik dari individu atau lingkungan (seperti lingkungan keluarga, sekolah, atau komunitas) yang dapat meningkatkan kemampuan individu menghadapi kesulitan dalam kehidupan dengan baik. Faktor ini mengarahkan pada perbaikan atau perlindungan individu terhadap faktor risiko

saat menghadapi adversity atau kemalangan. Faktor protektif memiliki peran penting dalam memodifikasi efek negatif dari lingkungan yang merugikan hidup serta mampu menguatkan resiliensi seseorang (Nasution, 2011). Dari faktor-faktor resiliensi diatas dapat disimpulkan bahwa faktor risiko dapat berasal dari keluarga atau dari diri sendiri, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi individu untuk memunculkan perilaku negatif. Sedangkan faktor protektif merupakan respon positif individu, yang mana respon tersebut dapat dipengaruhi oleh diri individu atau pun lingkungan dalam menghadapi situasi sulit. Individu dapat dikatakan memiliki resiliensi ketika mampu meminimalisir faktor risiko dan mampu memodifikasi efek negatif menjadi positif. Menurut Grotberg (2004), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi resiliensi pada individu, faktor tersebut yaitu:

1) Tempramen

Tempramen merupakan pembawaan dari individu yang memiliki reaksi (Anshari, 1996: 692). Tempramen memiliki pengaruh terhadap bagaimana individu bereaksi terhadap rasangan. Tempramen dasar yang dimiliki oleh seorang dapat mempengaruhi bagaimana kualitas individu ketika menjadi seseorang yang sesungguhnya, apakah akan menjadi seorang individu pengambil resiko atau individu yang lebih berhati-hati.

2) Inteligensi

Inteligensi disini diartikan sebagai kemampuan individu untuk bertemu dan menyesuaikan diri pada situasi secara cepat dan efektif (Ashari, 1996: 296). Selain itu inteligensi juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memanfaatkan konsep-konsep yang abstrak secara efektif (Ashari, 1996: 296). Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan banyak dibuktikan, kalau inteligensi rata-rata atau rata-rata bawah lebih penting dalam kemampuan resiliensi seseorang. Namun Grotberg (1999) dalam penelitiannya membuktikan bahwa tidak hanya satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan resiliensi, melainkan banyak faktor.

3) Budaya

Perbedaan budaya yang ada juga merupakan salah satu faktor yang membatasi perbedaan dinamika dalam mempromosikan resiliensi.

4) Usia

Kemampuan resiliensi juga dapat dipengaruhi oleh usia individu. Anak-anak yang lebih muda (dibawah usia 18 tahun) lebih tergantung pada sumber-sumber yang berasal dari luar. Sedangkan individu yang lebih tua lebih tergantung pada sumber yang berasal dari dalam dirinya sendiri.

5) Gender

Perbedaan gender juga mempengaruhi dalam perkembangan resiliensi yang terjadi.

6) Risk Factor (Faktor Resiko)

Faktor resiko adalah faktor yang dapat menyebabkan kerentanan terhadap stress. Dalam penelitian yang berkaitan dengan resiliensi, konsep risk ini menjelaskan adanya kemungkinan terdapat ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri (maladjustment) disebabkan kondisi-kondisi yang bersifat menekan. Selain itu faktor ini juga menyebabkan kemungkinan adanya keadaan yang tidak menyenangkan yang dapat dirasakan oleh individu. Hal tersebut seperti halnya anggota dari kelompok yang beresiko tinggi, yaitu anak-anak yang tumbuh kembang dalam keluarga yang memiliki status ekonomi rendah, tumbuh kembang dalam daerah yang penuh dengan kekerasan, anak yang lahir dengan keadaan cacat, memiliki penyakit dan cedera lainnya serta pengalaman trauma maupun stress (Schoon, 2006: 1). Faktor resiko yang dimaksudkan dalam hal ini mencakup hal-hal yang dapat menyebabkan individu beresiko atau mengalami dampak buruk. Bentuk resiko tersebut dapat berupa gangguan perkembangan maupun gangguan psikologis. Untuk faktor-faktor resiko sendiri dapat berasal dari faktor biologis, faktor psikologis, faktor lingkungan serta faktor sosial ekonomi yang dapat memengaruhi adanya kemungkinan kerentanan terhadap stress (Schoon, 2006: 9).

7) Protective Factor (Faktor Pelindung)

Studi tentang resiliensi selalu dihubungkan dengan faktor protektif. Faktor protektif ini didefinisikan sebagai sifat maupun situasi tertentu yang dibutuhkan untuk proses terjadinya ketahanan. Werner juga menyatakan bahwa dalam terbentuknya suatu resiliensi, banyak hal yang dapat dijadikan sebagai protective factor ketika individu dihadapkan dengan kondisi yang menekan dalam hidupnya (Werner, 2005: 5).

Namun dalam penelitian selanjutnya yang pernah dilakukan, proses protektif dianggap memiliki nilai yang besar dalam munculnya sebuah resiliensi dan juga pencegahan akibat-akibat yang negatif (Dyer & mcGuinness dalam Ramirez & Earvolino, 2007: 75).

Faktor pelindung yang dimaksudkan dalam hal ini adalah faktor yang memiliki sifat menunda, meminimalisir, mentralisir pada hasil akhir yang negatif. dalam faktor pelindung ini terdapat dua kategori. pertama, yaitu internal protective faktor dimana sumber faktor pelindung yang berasal dari dalam diri individu untuk mencapai suatu resiliensi. Kedua, external protective factor dimana faktor ini berasal dari luar individu, berupa dukungan yang dapat diberikan oleh keluarga maupun lingkungan tempat tinggal individu tersebut (McCubbin, 2001: 9).

2.5.5 Pekerja Sosial Dalam Resiliensi di LPKA

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam resiliensi anak di LPKA, karena dapat memberikan dukungan emosional serta kemandirian dalam mengatasi tantangan kehidupan di dalam maupun setelah keluar dari LPKA. Pekerja sosial memainkan peran penting dalam resiliensi anak binaan di LPKA untuk membantu anak-anak dalam seluruh aspek-aspek resiliensi.

2.6 Konsep Dasar Anak Binaan

2.6.1 Pengertian Anak Binaan

Anak Binaan adalah seorang anak yang berumur 14 (empat belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini berbeda dengan penyebutan sebelumnya yang dikenal tentang Pemasyarakatan yang menggunakan definisi Anak Didik Pemasyarakatan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: Pertama, Anak Pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun. Kedua, Anak Negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama hingga berumur 18 (delapan belas) tahun. Ketiga, Anak Sipil merupakan anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. Terminology mengenai perubahan LAPAS anak yang disebutkan dalam UU No. 12 tentang Pemasyarakatan juga mengalami perubahan pada UU Pemasyarakatan yaitu menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menjadi lembaga atau tempat bagi Anak Binaan menjalani masa pidananya.

Anak binaan umumnya merujuk kepada individu yang mendapatkan bimbingan, pembinaan, atau perlindungan khusus, seringkali dari lembaga atau organisasi tertentu. Pengertian panjangnya melibatkan proses pendampingan, pengembangan potensi, dan pemenuhan kebutuhan anak tersebut untuk mencapai perkembangan optimal, baik secara fisik maupun psikososial. Perlindungan hak-hak anak, penyediaan pendidikan, serta pembinaan moral dan sosial menjadi fokus dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak binaan.

2.7 Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Dalam hukum terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap tiap peraturan perundang – undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak sebagai berikut:

- 1) Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.
- 2) Anak menurut hukum perdata pasal 330 KUHP perdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- 3) Anak menurut undang- undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:
 - a) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (pasal 1 ayat 3 UU SPPA)
 - b) Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) (pasal 1 ayat 4 UU SPPA)
 - c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi) (pasal 1 ayat 5 UU SPPA).

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maldi Gultom mengatakan bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses pertumbuhan dan perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa.

Dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, penjelasan tentang anak terdapat pasal 1 ayat 1 anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan. Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat 3 anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 delapan belas tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

2.8. Peran Pekerjaan Sosial Bagi Anak Binaan

Pekerjaan sosial memiliki peran penting dalam membantu anak binaan, termasuk dengan memberikan dukungan emosional, memberikan keterampilan sosial, dan mendukung proses rehabilitasi agar anak-anak tersebut dapat kembali menjadi bagian produktif masyarakat. Pekerjaan sosial juga melibatkan pengawasan dan pemantauan kondisi anak binaan untuk memastikan lingkungan rehabilitasi yang aman dan efektif sehingga timbul rasa aman pada anak binaan.

